

**DAMPAK BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
STUDI KASUS: PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA
TAHUN 2011-2015**

Riya Dwi Handaka

handaka@pknstan.ac.id

Abstrak

There are many ways for region to raise its economic growth and welfare. Through of accuracy of expenditures, regions can objectify their vision and goals to growth their economics and welfare. On this research aims to examine the effects of capital expenditures on welfare indicators. We use secondary data by using all of local governments in Indonesia as research sample. There is variable capital expenditures of local governments as an exogenous variable, while the Human Development Index, labor absorption, and poverty level as an endogenous variable. This study uses panel data which combines time series data and cross section. These data were analyzed using regression with Eviews program. The results with significance level $\alpha = 0.05$ showed that all hypothesis are accepted. Its proved, that capital expenditures have effects positive significantly on the Human Development Index and labor absorption, and have effects negative significantly on poverty level.

Keywords: *Capital expenditures of local governments, labor absorption, Human Development Index, and poverty.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tahun ini pemerintah disibukkan dengan adanya perlambatan ekonomi dunia, hal ini berdampak bagi Indonesia dimana pada Tahun 2017 ini menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,1% sama dengan pencapaian tahun 2016. Pencapaian pertumbuhan sebesar 5,1% merupakan sebuah prestasi ditengah kondisi dunia yang mengalami perlambatan ekonomi. Dengan pertumbuhan sebesar itu, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Di antara negara-negara besar dan negara-negara tetangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya kalah dari China, India, dan Filipina. Sebagai contoh dampak perlambatan perekonomian dirasakan oleh Amerika Serikat, yang melambat dari 2,6 persen pada 2015 menjadi 2,1 persen pada 2016. China juga melambat dari 6,9 persen menjadi 6,7 persen. Begitu pula dengan Jepang dan Malaysia.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya menggunakan APBN dengan cermat dan membuat langkah kebijakan anggaran yang tepat dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi baik regional maupun secara nasional. Salah satu kebijakan anggarannya adalah peningkatan alokasi belanja modal ke infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2017). Belanja yang berfokus pada infrastruktur ini, merupakan salah satu bentuk reformasi struktural belanja negara, dimana merupakan upaya Pemerintah untuk memaksimalkan peran belanja negara di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK dan didukung oleh segenap komponen bangsa telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Dari

data sebagaimana (Indonesia, 2017) disebutkan bahwa penyerapan anggaran belanja K/L, terutama untuk infrastruktur dalam Semester I tahun 2016 telah menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. Di samping itu, indikator di bidang kesejahteraan sosial mengalami perbaikan, terutama ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan Gini Ratio, serta pengurangan tingkat pengangguran. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan juga terus mengalami peningkatan dari 68,90 tahun 2014 menjadi 69,55 tahun 2015. Diharapkan dengan percepatan pembangunan, dapat mewujudkan tujuan utamanya yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintahan Jokowi-JK telah menerbitkan beberapa paket kebijakan ekonomi, yang diantara isinya adalah kebijakan peningkatan infrastruktur, program satu juta rumah untuk penduduk miskin, wajibnya pekerja memiliki jaminan kesehatan (BPJS), dan memperluas lapangan kerja serta kemudahan berusaha. Dari paket kebijakan ekonomi dan kebijakan anggaran yang telah dibuat, peneliti melihat fokus kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Dari kebijakan pemerintah tersebut, terjadi peningkatan belanja infrastruktur, belanja pendidikan, dan belanja kesehatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data BKF, rata-rata belanja infrastruktur pemerintah tahun 2011-2014 dibandingkan dengan tahun 2015-2017 mengalami peningkatan 123,4%. Sedangkan rata-rata belanja pendidikan dan kesehatan tahun 2015-2017 mengalami peningkatan sebesar 27,4% dan 83,2% dibanding rata-rata tahun 2011-2014. Penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan, berdasarkan data BPS, tercatat sebanyak 108,21 juta penduduk yang bekerja sedangkan tahun 2015 naik menjadi 114,82 juta penduduk.

Adanya peningkatan belanja infrastruktur berarti terjadi peningkatan belanja modal pemerintah. Secara langsung, belanja pemerintah akan meningkatkan Produk Domestik Bruto yang berarti bahwa belanja pemerintah merupakan pendorong ekonomi untuk tetap tumbuh. Selain itu, terdapat *multiplier effect* dari belanja modal yang dilakukan pemerintah yakni berupa menciptakan lapangan pekerjaan yang akan mengurangi pengangguran. Belanja modal yang dilakukan pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat mengurangi pengangguran, berkurangnya pengangguran berarti pula berkurangnya penduduk yang tidak berpenghasilan, sedangkan penduduk yang tidak produktif (menganggur) merupakan salah satu sebab kemiskinan itu sendiri. Belanja modal pada sektor tertentu akan menyebabkan peningkatan produktifitas pada sektor itu juga, misalnya belanja modal pada sektor pertanian akan menyebabkan peningkatan produktifitas petani secara umum, yang berarti akan meningkatkan penghasilan petani, dengan peningkatan penghasilan tersebut akan berpengaruh langsung pada pengurangan kemiskinan di sektor pertanian. Penelitian (Fan, Hazell, & Thorat, 2000) di Negara India menyimpulkan bahwa belanja pemerintah dalam investasi yang produktif seperti belanja penelitian, belanja irigasi pertanian, dan infrastruktur, berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan penduduk di India.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam belanja modal untuk pendidikan dan kesehatan secara langsung mendukung peningkatan IPM karena IPM terdiri dari tiga komponen utama, yakni angka melek huruf (pendidikan), kesehatan, dan pengeluaran penduduk. IPM yang meningkat menandakan adanya peningkatan pendidikan serta kesehatan penduduk, dengan pendidikan dan kesehatan yang baik akan memicu peningkatan produktifitas penduduk secara umum, yang dapat diikuti dengan peningkatan penghasilan, sehingga bermuara pada pengentasan kemiskinan. Penduduk yang berpenghasilan tinggi akan memiliki kebiasaan belanja yang besar juga, sehingga

akan menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi. Penelitian Nurmainah (2014) dan (Muhammad Afzal, A. et al, 2009) menyimpulkan bahwa IPM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun (Andaiyani, 2012) menyebutkan bahwa dalam studi kasus di Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat IPM berkorelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Mengingat peran pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, peneliti mencoba untuk melihat peran efektifitas alokasi belanja modal dalam meningkatkan kesejahteraan wilayah. Terlebih menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dalam (Rizal Ramli, 2015) menyebutkan bahwa 70 tahun merdeka, Indonesia dianggap belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini membuat tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi paling rendah dibandingkan negara ASEAN lain. Menurut (Rizal Ramli, 2015) tingkat kesejahteraan masyarakat melekat dengan pertumbuhan ekonomi, namun meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia moderat tapi tingkat kesejahteraan rakyatnya nyaris *flat* dan tidak membaik. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang paling penting mengukur kesejahteraan rakyat. Bila kita ingin mengukur kesejahteraan rakyat maka harus melihat indeks kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan penjelasan dan beberapa rujukan penelitian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab dampak alokasi belanja modal terhadap IPM, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan. Dengan mengambil sampel seluruh kabupaten/kota di Indonesia, diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa dengan adanya belanja modal yang efektif yang merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi melalui kebijakan fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini merupakan replikasi model penelitian terdahulu, dengan memberikan sentuhan yang berbeda pada objek penelitian yang diperluas menjadi seluruh kabupaten/kota diseluruh Indonesia dan tidak regional serta merupakan penggabungan output dari model penelitian sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya.

Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: a) menganalisis pengaruh Belanja Modal Kabupaten/Kota terhadap IPM kabupaten/kota; b) menganalisis pengaruh Belanja Modal Kabupaten/Kota terhadap jumlah tenaga kerja terserap kabupaten/kota; c) menganalisis pengaruh Belanja Modal Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam sisi pengetahuan, penelitian, dan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan kebijakan penganggaran khususnya belanja dalam APBN/APBD, serta peraturan perundang-undangan yang menyertainya; b) kontribusi empiris, untuk memperkuat penelitian sebelumnya, berkenaan dengan pengaruh besarnya belanja modal, IPM, jumlah tenaga kerja terserap, dan kemiskinan daerah kabupaten/kota di Indonesia; dan c) kontribusi teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten/kota di Indonesia sebagai objek observasi, dengan periode data penelitian tahun 2011 s.d. 2015. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang keberadaannya tidak melingkupi waktu tersebut, akan dikecualikan dari penelitian ini termasuk

kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun data untuk variabel penelitian ini terbatas pada data yang tersedia dari DJPK, BPS, dan BPK serta *website* BPS Provinsi atau *website* BPS Kabupaten/kota.

LANDASAN TEORI

Teori Belanja Pemerintah

Keynes dalam (Sadono Sukirno, 2000) menyebutkan, peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan. Apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan.

Mankiw dalam (Nurmainah, 2013) menyebutkan bahwa tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat. Jika pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan agregat akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah di negara berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas. Jadi, belanja pemerintah yang meningkat akan berdampak pada peningkatan Produk Domestik bruto (PDB) atau bisa juga disebut sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi.

Adapun belanja pemerintah disini diwakili dengan belanja modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 53 belanja modal merupakan jenis belanja langsung pada APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gudang dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Keberadaan anggaran belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat dan pendapatan asli daerah mempunyai strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Terdapat beberapa model belanja modal pemerintah menurut Rostow dan Musgrave dalam (Wicaksono, 2014) yaitu:

- a. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase inventasi pemerintah terhadap total investasi adalah besar, karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti: pendidikan, kesehatan, transportasi.
- b. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.
- c. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut dalam pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti: program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Teori Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sejak tahun 1998, BPS menggunakan usia 15 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk usia kerja.

Lewis dalam (Nurmainah, 2013) menjelaskan bahwa perekonomian dibagi menjadi dua

sektor yaitu: (a) sektor tradisional (pedesaan yang subsisten) yang ditandai oleh produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah bahkan nol; (b) sektor modern (industri perkotaan) dimana tenaga kerja dari sektor subsisten berpindah secara perlahan. Tingkat akumulasi modal industri (investasi) yang dilakukan di sektor modern, maka akan menarik tenaga kerja dari sektor tradisional, sehingga penyerapan tenaga kerja tersebut akan menambah produk yang dikeluarkan yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi (peningkatan produk domestik bruto). Todaro dalam (Nurmainah, 2013) mengemukakan, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan menambah jumlah tenaga yang produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya lebih besar.

Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) dalam (Harmawanti Marhaeni, Sri Yati, 2007) menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Menurut Ramires dalam (Wicaksono, 2014) tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Adapun menurut Mankiw dalam (Nurmainah, 2013), modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar.

Teori Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan dipandang sebagai rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Menurut BPS (2015), melalui penghitungan indeks kemiskinan, memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Terdapat banyak faktor penyebab kemiskinan. Menurut (Wahyudi, 2011) penyebab kemiskinan di antaranya produktivitas tenaga kerja, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, inflasi, pajak, dan subsidi. Selain itu alokasi serta kualitas sumber daya alam, ketersediaan fasilitas umum (pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, listrik, dan air bersih), tingkat pendidikan dan kesehatan, politik, dan bencana alam juga mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah. (Nurmainah, 2013) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa terdapat tiga faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yakni belanja modal pemerintah, IPM, dan tenaga kerja terserap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data yang dianalisis merupakan data sekunder berupa data panel dengan waktu penelitian dari tahun 2011 s.d. 2015. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana (*sample regression*) sebagai teknis analisisnya yang dinyatakan dalam formulasi:

$$\text{Regresi} = Y = a + bx + \epsilon$$

Persamaan dari model yang dibentuk adalah

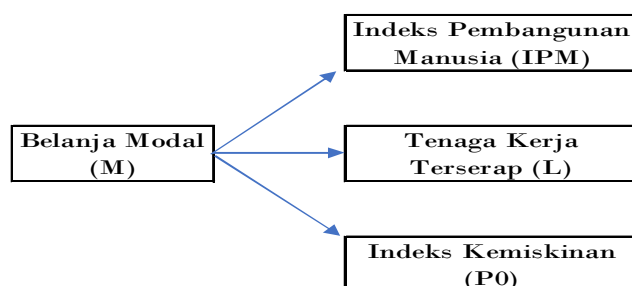
$$\begin{aligned} \text{H1. } & M = a + a_1 \text{ IPM} + \epsilon \\ \text{H2. } & M = a + a_2 L + \epsilon \\ \text{H3. } & M = a + a_3 P_0 + \epsilon \end{aligned}$$

Keterangan:

- M : belanja modal pemerintah kabupaten/kota
- L : tenaga kerja terserap pada kabupaten/ kota
- IPM : Indeks Pembangunan Manusia
- P0 : indeks kemiskinan kabupaten/kota
- a : konstanta regresi
- ϵ : *error term*

Model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Model Penelitian



Definisi variabel dalam penelitian ini dijelaskan dibawah ini.

- a. Belanja modal (M) adalah jumlah belanja modal pemerintah kabupaten/kota berdasarkan realisasinya.
- b. Kemiskinan adalah indeks kemiskinan (P0). Indeks kemiskinan (P0) adalah persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah total penduduk kabupaten/kota. Angka ini dapat menunjukkan kondisi kemiskinan di suatu daerah. Semakin besar angka indeks kemiskinan berarti semakin buruk tingkat kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.
- c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah angka yang menunjukkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup

sehat, tingkat pengetahuan, dan standar hidup layak.

d. Jumlah tenaga kerja terserap (L) adalah jumlah angkatan kerja kabupaten/kota yang benar-benar bekerja pada tahun penelitian. Jumlah tenaga kerja terserap merupakan jumlah penduduk yang bekerja di suatu kabupaten/kota berdasarkan publikasi BPS.

Adapun Hipotesis Penelitian yang dibentuk adalah sbb:

1. Alokasi terhadap Belanja Modal kabupaten/kota pada APBD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Indonesia;
2. Alokasi terhadap Belanja Modal kabupaten/kota pada APBD berpengaruh positif terhadap Tenaga Kerja Terserap (L) kabupaten/kota di Indonesia;
3. Alokasi terhadap Belanja Modal kabupaten/kota pada APBD berpengaruh negatif terhadap Indeks Kemiskinan (P0) kabupaten/kota di Indonesia;

Penggunaan analisis regresi linear sederhana pada penelitian ini dikarenakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, dimana jumlah variabel independen hanya satu (Sofyan Yamin dkk, 2011). Pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji pemilihan model, dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik diperlukan agar hasil regresi yang dilakukan bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi.

Menurut (Widarjono, 2013) terdapat tiga model yang digunakan dalam regresi data panel yaitu *Common Effect Model*, Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*) dan Model Efek Random (*Random Effect Model*). Untuk menentukan model estimasi data panel terbaik, peneliti akan melakukan uji *Chow (Likelihood Ratio Test)*, Uji Hausman dan *Lagrange multiplier Test*.

Untuk membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, peneliti akan melakukan uji t, dan uji R^2 . Uji t digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara parsial. Sementara uji R^2 dipakai untuk menjelaskan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variansi dari variabel terikatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data dalam variabel regresi terdapat residual yang terdistribusi normal. Dalam penelitian ini, kabupaten/kota yang masuk dalam objek penelitian berjumlah 413. Dengan jumlah variabel 4 dan waktu lima tahun, didapatkan jumlah observasi sebanyak 2065 observasi. Menurut Gujarati (2012), analisis data panel dengan objek melebihi 100 observasi dapat dikatakan telah memenuhi normalitas data, sehingga tidak memerlukan uji normalitas dikarenakan distribusi *error term* telah mendekati normal.

Uji multikolinearitas merupakan pengujian untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel bebasnya. (Ghozali, 2006) menjelaskan bahwa jika di antara variabel bebasnya terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0.95), maka hal tersebut merupakan indikasi adanya masalah multikolinearitas. Sementara Widarjono (2013) menjelaskan bahwa koefisien korelasi antar variabel bebasnya lebih dari 0,85, maka diduga telah ada masalah multikolinearitas dalam model.

Uji autokorelasi merupakan pengujian untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test, dengan hipotesis jika ($\rho\text{-value} < \alpha$) maka terdapat masalah autokorelasi sedangkan jika ($\rho\text{-value} > \alpha$) tidak ada masalah autokorelasi, dengan α 5%.

Uji heterokedastisitas merupakan pengujian untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat varian yang tidak konstan. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji heterokedastisitas ini, baik dengan metode grafik maupun dengan metode formal seperti Uji Glejser, Uji Breusch-Pagan/Godfrey, Uji White, Uji ARCH, atau Uji Harvey. Hipotesis dari pengujian formal ini adalah jika ($\rho\text{-value} < \alpha$), maka terdapat masalah heteroskedastisitas, sementara jika ($\rho\text{-value} > \alpha$), maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Adapun hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Model I	Model II	Model III
Multikolinearitas	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Autokorelasi	ada	ada	ada
Heterosketastisitas	ada	ada	ada

Sumber: data diolah.

(Nachrowi, 2006) menjelaskan bahwa dalam model *fixed effect*, sulit dipenuhi asumsi terbebasnya model dari masalah autokorelasi, sehingga uji tentang autokorelasi dapat diabaikan. (Widarjono, 2013) menjelaskan bahwa penyembuhan autokorelasi dapat dilakukan dengan transformasi persamaan yang dikenal sebagai metode *generalized difference equation*. Pada dasarnya metode penyembuhan ini dilakukan dengan mengubah pendekatan regresi yang sebelumnya menggunakan *ordinary least squared* (OLS) menjadi *generalized least square* (GLS). Penyembuhan dengan cara ini dapat langsung dilakukan pada aplikasi *Eviews 9* saat meregresi data.

Masalah heteroskedastisitas seperti ini bisa terjadi secara alami pada variabel-variabel ekonomi. Dalam kasus penelitian ini, peneliti menemukan adanya kabupaten/kota dengan PDRB yang sangat berbeda, padahal kabupaten/kota tersebut memiliki belanja modal, jumlah tenaga kerja terserap, atau IPM yang hampir sama. Masalah ini dapat diatasi dengan *eviews 8*, yakni dengan metode *white period* saat melakukan regresi.

Uji Pemilihan Model

Likelihood Ratio Test atau *Chow test* merupakan metode yang digunakan untuk menentukan pemilihan model regresi yang lebih baik antara model FEM atau model PLS. Peneliti menggunakan α sebesar 5%, dengan hipotesis jika $\rho\text{-value} < \alpha$, maka model regresi dengan pendekatan FEM lebih sesuai. Sementara jika $\rho\text{-value} > \alpha$, maka model regresi dengan pendekatan PLS lebih sesuai untuk digunakan.

Hausman Test merupakan metode pengujian yang digunakan untuk memilih model regresi yang lebih baik antara pendekatan REM atau pendekatan FEM. Peneliti menggunakan α sebesar 5%, dengan hipotesis jika $\rho\text{-value} < \alpha$, maka model regresi dengan pendekatan FEM lebih sesuai. Sementara jika $\rho\text{-value} > \alpha$, maka model regresi dengan pendekatan REM lebih sesuai untuk digunakan.

Lagrange Multiplier Test merupakan metode pengujian untuk memilih regresi yang tepat antara REM dan PLS. Hipotesisnya adalah jika *Both value* pada Breusch-Pagan signifikan terhadap α 5% maka memilih model REM sebagai pendekatan regresi, sedangkan jika nilainya lebih dari

Tabel 2. Hasil Uji Pemilihan Model

Metode pengujian	Model regresi yang sesuai
	Persamaan 1, 2, dan 3
<i>Likelihood Ratio Test (Chow Test)</i>	<i>Prob. Cross Section Chi-Square =0,00</i> (model FEM)
<i>Hausman Test</i>	<i>Prob. Cross-section Random=0,00</i> (model FEM)
<i>Lagrange Multiplier Test (LM)</i>	<i>Breusch-Pagan Value (both)=0,00</i> REM

Sumber: hasil olah data

Uji *chow* dan uji *hausman* diperoleh hasil bahwa pendekatan FEM lebih sesuai untuk model regresi dari persamaan yang dibentuk. Sedangkan uji LM diperoleh hasil bahwa pendekatan REM lebih sesuai untuk model regresi persamaan yang dibentuk. Dari ketiga pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengujian dengan pendekatan FEM lebih sesuai untuk kedua model persamaan regresi (Lihat Tabel 2).

Uji Hipotesis

Pengujian regresi terdiri dari uji t, uji R^2 , dan uji F. Setelah dilakukan regresi dengan pendekatan FEM, diperoleh hasil sebagaimana Tabel 3, 4, dan 5 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Regresi dengan Pendekatan *Fix Effect (Cross Section Weight & White Period)* pada Model I

Variabel	Model (Kemiskinan)		Keterangan
	Coefficient	Prob. Value	
M	3.20E-09	0,0000	Signifikan (α 5%)
C	65.36196	0,0000	Signifikan (α 5%)
<i>Adj. R²</i>	0.977271 (97,7%)		<i>Model fit</i>
<i>F-stat</i>	0,0000		-

Sumber: hasil olah data

Tabel 4. Hasil Regresi dengan Pendekatan *Fix Effect (Cross Section Weight & White Period)* pada Model II

Variabel	Model (Kemiskinan)		Keterangan
	Coefficient	Prob. Value	
M	2.81E-05	0,0000	Signifikan (α 5%)
C	65.36196	0,0000	Signifikan (α 5%)

		5%)
<i>Adj. R²</i>	0.996423 (99,6%)	<i>Model fit</i>
<i>F-stat</i>	0,0000	-

Sumber: hasil olah data

Tabel 5. Hasil Regresi dengan Pendekatan *Fix Effect (Cross Section Weight & White Period)* pada Model III

<i>Variabel</i>	<i>Model (Kemiskinan)</i>		<i>Keterangan</i>
	<i>Coefficient</i>	<i>Prob. Value</i>	
M	-1.57E-11	0,0000	Signifikan (α 5%)
C	0.140213	0,0000	Signifikan (α 5%)
<i>Adj. R²</i>	0.983481 (98,3%)		<i>Model fit</i>
<i>F-stat</i>	0,0000		-

Sumber: hasil olah data

a. Uji t

Uji t merupakan pengujian dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan *p value* masing-masing variabel independen dengan α 5%. Jika *p value* kurang dari 5%, maka diambil kesimpulan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependennya, sementara jika *p value* lebih dari 5%, maka kesimpulannya sebaliknya, yakni variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

Dari model persamaan I, II, dan III yang dibentuk, dimana Belanja Modal sebagai variabel bebas, diperoleh kesimpulan bahwa

1. variabel independen belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM;
2. variabel independen belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja terserap;
3. variabel independen belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Kemiskinan.

b. Uji R²

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Widarjono, 2013). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Semakin besar nilai R^2 menandakan bahwa variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang yang dibutuhkan dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.

Dari model persamaan yang dibentuk diperoleh nilai *Adjusted R²* yang yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk model atau hipotesis I didapatkan sebesar 97,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen belanja modal dalam model dapat menjelaskan sebanyak 97,7% terhadap variasi variabel dependen IPM. Sementara sebanyak 2,3% variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dijelaskan dalam model persamaan.

2. Untuk model atau hipotesis II didapatkan sebesar 99,6%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen belanja modal dalam model dapat menjelaskan sebanyak 99,6% terhadap variasi variabel dependen Tenaga Kerja Terserap. Sementara sebanyak 0,4% variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dijelaskan dalam model persamaan.
3. Untuk model atau hipotesis III didapatkan sebesar 98,3%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen belanja modal dalam model dapat menjelaskan sebanyak 97,7% terhadap variasi variabel dependen Tingkat Kemiskinan. Sementara sebanyak 1,7% variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dijelaskan dalam model persamaan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan yang dihubungkan dengan landasan teori dan latar belakang diatas, dengan menggunakan data pada periode tahun 2011 s.d. 2015, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hipotesis I diterima, dimana telah dibuktikan bahwa Alokasi terhadap Belanja Modal kabupaten/kota pada APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Indonesia;
- b. Hipotesis II diterima, dimana telah dibuktikan bahwa Alokasi terhadap Belanja Modal kabupaten/kota pada APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tenaga Kerja Terserap (L) kabupaten/kota di Indonesia;
- c. Hipotesis III diterima, dimana telah dibuktikan bahwa Alokasi terhadap Belanja Modal kabupaten/kota pada APBD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Kemiskinan (P0) kabupaten/kota di Indonesia;

Dari simpulan tersebut membuktikan bahwa pengalokasian belanja daerah pada APBD dengan tepat khususnya dialokasikan dalam belanja modal, dimana belanja modal tersebut identik dengan belanja untuk infrastruktur atau investasi berupa asset dapat menstimulus kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dibuktikan dari pembuktian atas hipotesis penelitian yang telah dilakukan, dimana didapatkan hasil yang menyebutkan bahwa apabila belanja modal naik atau bertambah maka indeks pembangunan manusia (IPM) akan ikut naik, kemudian jumlah tenaga kerja yang terserap juga bertambah yang berarti mengurangi angka pengangguran, sedangkan kemiskinan akan turun atau berkurang, dan *centeris paribus*.

Implikasi dan Saran

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun penelitian sebelumnya dilakukan hanya dengan mengambil sample sedikit/regional seperti yang dilakukan (Nurmainah, 2013), (Andaiyani, 2012) dll. Penelitian ini membuktikan bahwa secara nasional, belanja modal memiliki peran terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota yang diwakili Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah tenaga kerja terserap, dan kemiskinan.

Untuk itu dari implikasi tersebut guna menjaga kesejahteraan lebih baik lagi *fiscal and budget policy* pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mempertimbangkan hal berikut:

- a. Memperbanyak jenis Transfer Ke Daerah yang bersifat belanja fisik pada APBN.
- b. Memperbanyak porsi belanja daerah pada APBD berupa belanja modal.
- c. Dikarenakan belanja modal berpengaruh terhadap IPM maupun kemiskinan, perlu

- ada program serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM penduduknya. Diantara program yang dapat meningkatkan IPM adalah dengan meningkatkan belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan belanja pekerjaan umum.
- d. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dapat menerapkan kebijakan belanja modal pada APBD melalui skema dana transfer ke daerah dan Kebijakan Penyusunan APBD. Kebijakan penganggaran transfer dapat diarahkan kepada belanja modal khususnya untuk daerah-daerah yang infrastrukturnya masih belum memadai serta daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (di atas rata-rata).
 - e. Pemerintah perlu melanjutkan kebijakan peningkatan belanja modal, terutama diarahkan untuk sektor pertanian dan perdagangan, dikarenakan kedua sektor tersebut menampung sekitar 55,66% jumlah tenaga kerja di Indonesia. Adapun prioritas belanja modalnya untuk kedua sektor tersebut, misalnya belanja modal irigasi, pembukaan lahan baru, teknologi pertanian, *Research and Development* pada pertanian, serta belanja modal untuk infrastruktur jalan dan transportasi. Sesuai hasil penelitian Fan *et. al.* (2000) yang menyebutkan bahwa belanja pemerintah dalam sektor produktif akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.
 - f. Pemerintah daerah dapat bersinergi dengan pemerintah pusat maupun dengan swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

B. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Sumber lainnya

- Andaiyani. (2012). *Pengaruh Indeks Pembangunan Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat*. Universitas Tanjungpura.
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (2000). Government Spending , Growth and Poverty in Rural India. *American Journal of Agricultural*, 82(November), 1038–1051. Retrieved from <https://academic.oup.com/ajae/article-abstract/82/4/1038/96675>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harmawanti Marhaeni, Sri Yati, B. T. M. (2007). *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Indonesia, R. (2017). *Buku II Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017*.
- Muhammad Afzal, A. Rauf Butt, Hafeez Ur Rehman, and I. B. (2009). A Dynamic Analysis of the Relationship among Human Development , Exports and Economic Growth in Pakistan. *The Pakistan Development Review* 48, 48(Winter), 885–920.
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah ,Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 131–141.
- Sadono Sukirno. (2000). *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Keynesian Baru* (Pertama). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan Yamin, Lien A. Rachmach, H. K. (2011). *Regresi dan Korelasi Dalam Genggaman Anda*.

Wicaksono, M. N. (2014). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan belanja modal daerah terhadap peningkatan pdrb provinsi di indonesia tahun 2008-2012, (UB).

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (Keempat). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Website

Rizal Ramli. (2015). 70 Tahun Merdeka, Kesejahteraan Rakyat Indonesia Paling Rendah di ASEAN. Retrieved September 14, 2015, from <http://economy.okezone.com/read/2015/09/15/20/1214486/70-tahun-merdeka-kesejahteraan-rakyat-indonesia-paling-rendah-di-asean>